UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**URGENSI PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) MELALUI BEST PRACTISE KEIMIGRASIAN:
STUDI PADA MODUS OPERANDI ONLINESCAMMING**
FAKHRI HAFIZ AM, Prof.Dr.Heribertus Jaka Triyana,S.H.,LL.M.,M.A
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

ABSTRACT

The development of human trafficking crimes has undergone a significant transformation with the advancement of information technology, particularly through online scamming schemes linked to online gambling and transnational cybercrime. This modus operandi poses new challenges to immigration law enforcement, as victims often travel across borders using formally valid travel documents, making early detection through conventional immigration control mechanisms increasingly difficult. This study aims to analyze the obstacles faced by immigration authorities in addressing human trafficking cases involving online scamming under Law Number 6 of 2011 on Immigration, as well as to formulate immigration best practices to strengthen countermeasures against such crimes.

This research employs a juridical-empirical approach using qualitative methods. The juridical analysis examines national legislation and relevant international legal instruments concerning human trafficking and immigration, while the empirical approach is conducted through in-depth interviews with immigration officials at Immigration Checkpoints and an analysis of immigration law enforcement practices in handling online scamming-based trafficking cases.

The findings reveal that immigration authorities encounter several challenges, including limited inspection time at immigration checkpoints, insufficient human resource capacity, suboptimal utilization of risk-based immigration intelligence systems, and the lack of integration of a victim-centered protection perspective into immigration operational procedures. This study concludes that combating human trafficking through online scamming requires the implementation of immigration best practices that emphasize selective policy enforcement, risk-based passenger profiling, the effective use of immigration information systems, and strengthened inter-agency coordination, while consistently upholding human rights principles.

***Keywords**: human trafficking, immigration law, online scamming, best practices, transnational crime.*

URGENSI PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) MELALUI BEST PRACTISE KEIMIGRASIAN:
STUDI PADA MODUS OPERANDI ONLINESCAMMING
FAKHRI HAFIZ AM, Prof.Dr.Heribertus Jaka Triyana,S.H.,LL.M.,M.A
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

INTISARI

Perkembangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menunjukkan transformasi signifikan seiring pemanfaatan teknologi informasi, khususnya melalui modus operandi online scamming yang terhubung dengan praktik judi daring dan kejahatan siber lintas negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh otoritas keimigrasian dalam menangani TPPO dengan modus online scamming berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta merumuskan penerapan best practice keimigrasian dalam memperkuat upaya penanggulangan TPPO.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode kualitatif. Pendekatan yuridis dilakukan melalui analisis peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen hukum internasional terkait TPPO dan keimigrasian, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pejabat imigrasi pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi serta analisis praktik penegakan hukum keimigrasian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa otoritas keimigrasian menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan waktu pemeriksaan, kapasitas sumber daya manusia, belum optimalnya pemanfaatan sistem intelijen keimigrasian berbasis analisis risiko, serta belum terintegrasinya perspektif perlindungan korban TPPO dalam prosedur operasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanggulangan TPPO dengan modus online scamming memerlukan penerapan best practice keimigrasian yang berbasis selektifitas, profiling penumpang berisiko, pemanfaatan sistem informasi keimigrasian, dan koordinasi lintas sektor, dengan tetap mengedepankan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Kata kunci: koordinasi kebijakan, TPPO, perlindungan WNI, kerja sama antar-lembaga, Kamboja.